

## DAFTAR PUSTAKA

Alia, R. N., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. 2023. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2) (hal. 223-239)

Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2024.

Fatimah T, I. N. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan daerah Kota Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin

Firmansyah, H., & Nurdiana, H. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018-2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03) (hal 576-588).

Guntoro, M. 2021. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya, Vol 3(2)* (hal 1-9).

Halim, A dkk. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing. Medan.

Harefa, M. 2016. Kendala implementasi dan efektivitas pemungutan pajak PBB-P2 oleh pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Vol.7(1)* (hlm 67-82).

Helmi, N. 2019. Desain Organisasi Sebagai Jawaban Terhadap Harmonisasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja yang Sering Terlupakan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Hidayati, A dkk. 2024. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, Vol 15(1)*.

Inayati, T., & Fahrati, E. 2020. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Pengalihan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP:Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5(2)* (hal 723-737).



in Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2022 tentang Manajemen nerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor, M. Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan Vol 3(2)* (hal 134-150)
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. BN.2018/NO.1853, jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Pramesti, A. R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya. (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa)
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 113-120.
- Purwanto, A. 2022. *Kota Makassar: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur*. Kompas.id. (<https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/01/31/kota-makassar-pusat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-timur>. diakses pada 21 Maret 2024)
- Siahaan, H. S., & Kiswara, E. 2023. Tinjauan Kurva Laffer Terhadap Posisi Pajak Tangguhan Perusahaan dan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Sukardi, S., & Nurhani, N. 2021. Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Memaksimalkan PAD Kecamatan Bontoala Kota Makassar. *Nobel Management Review Vol. 2(3)* (hlm 483-497).
- Qorih A. 2021. *Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.



*Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2022. Jakarta: LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id : 100 hlm.*

*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 2000. Pemerintah Pusat: LN. 2000/ No. 130, TLN NO. 3988, LL SETNEG : 12 HLM*

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.*

*Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2015. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.*

*Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Pemerintah Pusat: LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM*

Yunani, A. 2022. Implementasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. *Ecoplan Vol. 5(2)* (hlm 120-128)

